TPST PIYUNGAN DITUTUP WARGA, OMBUDSMAN SOROTI LANGKAH PEMDA DIY

Selasa, 22 Desember 2020 - Yemima Dwi Kurnia Wati

SLEMAN, KRJOGJA.com - Ombudsman Perwakilan DIY menyoroti langkah lambat Pemda DIY dalam mengurai permasalahan pengelolaan sampah. Pasalnya saat ini ketika TPST Piyungan ditutup warga, sampah mulai menggunung di beberapa wilayah seperti Kota Yogyakarta dan Sleman.

Kepala Ombudsman Perwakilan DIY, Budhi Masthuri mengatakan pada bulan April 2020 Perwakilan Ombudsman RI DIY telah menyampaikan hasil kajian tentang "Pengelolaan Sampah di Kartamantul" kepada Gubernur DIY. Namun hingga kini belum memperoleh informasi terkait tindak lanjut saran tindakan korektif tersebut.

"Hari-hari belakangan ini kita kembali mendengar kabar tentang protes Warga Piyungan dengan menutup TPST Piyungan yang mengakibatkan terganggunya operasional dan mengancam DIY mengalami darurat sampah. Tindakan warga di sekitar lokasi TPST tersebut disebabkan karena melubernya sampah di jalan utama. Selain mengganggu akses jalan, musim hujan juga memicu bocornya air lindi masuk ke permukiman warga," ungkap Budhi melalui pernyataan tertulis, Selasa (22/12/2020).

Ombudsman menurut Budhi meminta Gubernur DIY untuk segera menindaklanjuti saran yang telah disampaikan seperti terkait anggaran pendukung, regulasi konkret batasan waktu penutupan TPST dengan sistem pembuangan terbuka, peralihan pengelolaan TPST Piyungan ke Pemda DIY belum optimal dan kurangnya instrumen pengawasan, penegakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan.

"Sampai saat ini fakta lapangan bahwa di TPST Piyungan tidak cukup terlihat adanya aktivitas penanganan dan pengelolaan sampah oleh petugas. Kegiatan yang mirip dengan penanganan dan pengelolaan sampah lebih banyak dilakukan oleh masyarakat di sekitar TPST Piyungan yang memanfaatkan sampah sebagai sumber pencaharian ekonomi," sambung Budhi.

Ombudsman pun sudah memberikan saran pada Gubernur DIY untuk mengurai masalah sampah ini. Salah satunya yakni dorongan untuk pembangunan infastruktur dan pengadaan teknologi pengelolaan sampah mutakhir yang ramah lingkungan dengan memperhatikan berbagai masukan yang pernah disampaikan.

"Kami berharap Pemda DIY segera melaksanakan saran yang sudah disampaikan sejak April lalu. Saat ini sampah kembali jadi masalah ketika Piyungan ditutup warga," pungkas dia. (Fxh)